

PEKERJAAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Aulia Hadi¹

Judul Buku : Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)
Pengarang : Edi Suharto, Ph.D.
Penerbit : PT. Refika Aditama Bandung
Tahun Terbit : 2006
Jumlah Halaman : (xvi + 274) halaman

Lembaran baru di tahun 2008 sudah dibuka. Di tahun ini pula Indonesia akan memasuki usia kemerdekaan yang ke-63, usia yang cukup matang bagi sebuah negara. Mendengar kata ‘merdeka,’ orang akan langsung berpikir tentang kebebasan, baik kebebasan fisik maupun mental. Di era kemerdekaan, rakyat pasti mendambakan kebebasan, seperti kebebasan untuk mengekspresikan aspirasinya, kebebasan mengenyam pendidikan, kebebasan dari rasa takut, dan tentu saja kebebasan dari rasa lapar, sebuah kebutuhan rakyat yang sangat mendasar. Lantas, sudahkah semua kebebasan ini dinikmati rakyat Indonesia di usia kemerdekaannya yang hampir genap 63 tahun? Jawabannya, dapat dipastikan hanya sekelumit rakyat Indonesia yang dapat menikmati ‘kemerdekaan.’

Saat ini, kondisi sosial masyarakat Indonesia mengalami beragam permasalahan yang sangat kompleks. Pada tahun 2008 ini, jumlah total populasi Indonesia mencapai 237.512.355 jiwa dan berada di urutan ke-4 dunia (US Census Bureau, 2008). Jumlah populasi yang cukup tinggi ini tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan sosial yang memadai. Akibatnya, kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari *HDI (Human Development Index)* Indonesia yang hanya mencapai angka 0.728 dan menempatkannya di peringkat 107 dari 177 negara di dunia (UNDP, 2005). Krisis multidimensional yang diawali dengan krisis moneter pada tahun 1997 semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

Indonesia. Beragam permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga konflik sosial kerap dijumpai di masyarakat Indonesia.

Permasalahan sosial masyarakat bukan sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Hanya saja, penyelesaian permasalahan ini membutuhkan perspektif dan pendekatan yang tepat sehingga memunculkan ide-ide yang inovatif.

Sesuai dengan judulnya, buku ini berpijak pada perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Melalui perspektif ini, penulis menyatakan pentingnya penggunaan pendekatan holistik dalam gerakan membangun dan memberdayakan masyarakat guna menyelesaikan beragam permasalahan sosial di masyarakat. Artinya, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus selalu mempertimbangkan isu-isu lokal maupun global, bukan seperti model pemberdayaan selama ini yang umumnya hanya memperhatikan konteks lokal. Hal ini dikarenakan komunitas lokal selalu dipengaruhi dinamika sistem sosial di sekelilingnya.

Buku yang terdiri dari 18 bab ini sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi dalam tiga bagian besar. Bagian *pertama* berbicara tentang konsep pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bagian *kedua* membahas bagaimana seharusnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan. Sedangkan, di bagian *ketiga*, penulis mengajak pembaca untuk melihat beragam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Di bagian pertama yang terdiri dari dua bab, penulis mulai memperkenalkan konsep pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Kedua konsep ini sebenarnya sudah menjadi diskursus global dan nasional. Sayangnya, kedua konsep ini belum merakyat sehingga banyak yang belum memahami hakikat kedua konsep tersebut.

Penyajian beragam definisi pembangunan kesejahteraan sosial mengawali pengenalan konsep di bab 1. Dari beragam definisi, penulis menyatakan bahwa pada hakikatnya, kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi, yaitu

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.

2. Institusi, arena, atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Tiga konsepsi di atas diperjelas dengan pendekatan yang sebaiknya digunakan dalam menganalisis pembangunan kesejahteraan sosial.

Melalui pendekatan pengembangan, paduan pendekatan residual dan institusional, pembangunan kesejahteraan sosial diupayakan sebagai pemenuhan hak sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Mengutip pendapat Midgley,

Developmental perspective is a process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development (hal. 14).

Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan program-program penguatan sosial dan ekonomi dalam skala masyarakat serta kebijakan ekonomi dan sosial di skala nasional.

Satu kritik tajam penulis sampaikan di bab ini. Menurutnya, sesuai dengan pasal-pasal dalam UUD 45 (Undang-undang Dasar 1945), seperti pasal 33 dan 34, Indonesia sebenarnya menganut paham 'Negara Kesejahteraan' (*Welfare State*) dengan model 'Negara Kesejahteraan Partisipatif' (*Participatory Welfare State*) atau biasa dikenal dengan istilah 'Pluralisme Kesejahteraan' (*Welfare Pluralism*). Hal ini berarti bahwa negara tidak boleh lepas tangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, terlebih dengan dalih ketiadaan dana. Penulis mengingatkan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.

Sedangkan di bab 2, penulis berbicara tentang konsep pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial memiliki makna yang lebih luas dari hanya sekedar kegiatan kedermawanan atau kemanusiaan. Seperti dikatakan Zastrow, pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat, dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (hal. 24). Jadi, pekerjaan sosial bertanggung jawab untuk

meningkatkan keberfungsian sosial seseorang maupun sistem sosial sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalankan peran sosialnya, serta menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupannya.

Kerangka teoritis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diuraikan secara rinci pada bab 3 sampai dengan bab 9. Di satu sisi, masyarakat perlu dikembangkan. Pengembangan di sini berarti masyarakat membutuhkan adanya peningkatan kualitas kehidupan. Pengembangan dapat dilakukan dengan pendekatan profesional, seperti pengembangan masyarakat lokal dan perencanaan sosial yang berupaya merawat, mengorganisasi, serta membangun masyarakat, maupun dengan pendekatan radikal, seperti aksi sosial yang selalu melancarkan beragam aksi berdasarkan kelas, gender, maupun ras. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi permasalahan sosial yang ada, bahkan mengubah struktur kekuasaan, lembaga, dan sumber yang ada.

Di sisi yang lain, masyarakat juga harus diberdayakan. Masyarakat tidak boleh terlena dan selalu mengandalkan kekuasaan yang ada. Masyarakat, khususnya kelompok lemah, harus belajar memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki sehingga memiliki kekuasaan dan posisi tawar yang lebih kuat. Seperti dikatakan Susanto (2000:13), pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan baru terhadap usaha pemberdayaan masyarakat (*community based development approach*). Melalui pendekatan ini, pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat guna karena sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Penulis menawarkan 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan) sebagai upaya penerapan pemberdayaan. 5P memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya, memperkuat pengetahuan dan kemampuannya, melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas kelompok kuat, menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan, serta memelihara keseimbangan distribusi kekuasaan antarkelompok. Di sinilah peran pekerja sosial dibutuhkan. Sebagai perantara, pekerja sosial diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*) dan menentukan nasibnya sendiri (*self determining*) karena pekerja sosial

bekerja dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat (*working with people, not working for people*).

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan baik sehingga memunculkan konsekuensi positif yang nyata. Hal pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan program. Melalui perencanaan program, beragam masalah dapat diidentifikasi sehingga dapat diketahui program-program responsif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Setelah merencanakan program, berikutnya dapat dilakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini akan memberikan gambaran tentang masyarakat secara sistematis. Pendampingan sosial dapat dilakukan setelah gambaran program dan masyarakat diperoleh. Melalui pendampingan sosial akan terjadi interaksi antara kelompok yang membutuhkan dengan pekerja sosial untuk bersama-sama menghadapi tantangan. Analisis kebijakan sosial juga penting untuk dilaksanakan sehingga dapat diketahui konsekuensi-konsekuensi dari implementasi kebijakan sosial terhadap masyarakat. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah monitoring dan evaluasi program. Monitoring akan menunjukkan jalannya sebuah program yang sudah direncanakan. Sementara evaluasi akan mengindikasikan keberhasilan atau kegagalan dari suatu rencana program. Melalui bagian kedua ini, penulis ingin menegaskan kembali perlunya sebuah kerangka teoritis dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan atau program pengembangan dan pemberdayaan.

Penjelasan bagian kedua yang panjang lebar hanya memuat kerangka teoritis bagaimana sebaiknya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan. Bagian ini tidak memberikan penjelasan bagaimana kerangka teoritis tersebut dioperasionalkan dalam dunia praktis. Penjelasan penulis tidak disertai contoh-contoh aplikatif yang sebenarnya akan sangat membantu pembaca untuk lebih memahami atau bahkan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kerangka teoritis ini akan lebih baik jika diikuti studi kasus sebuah permasalahan, sehingga pembaca memperoleh gambaran bagaimana sebuah program direncanakan hingga dievaluasi.

Bagian terakhir buku ini lebih banyak mengilustrasikan beragam permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sosial yang dianggap paling krusial untuk segera diselesaikan adalah kemiskinan. Penulis menekankan pentingnya konsepsi multidimensional

yang mencakup ekonomi, politik, dan sosial psikologis untuk mengkaji kemiskinan. Konsepsi multidimensional ini sebenarnya hampir sama dengan indikator kemiskinan Chambers. Secara sederhana, ia merumuskan adanya lima 'ketidakberuntungan' yang melilit orang miskin, yaitu kemiskinan (*poverty*), fisik yang lemah (*physical weakness*), kerentanan (*vulnerability*), keterisolasian (*isolation*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) (Soetrisno, 1997:18).

Selain kemiskinan, ada tujuh permasalahan sosial lain yang juga dibahas penulis di bagian akhir. Ketujuh permasalahan tersebut adalah perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*); aliansi strategis dalam pemberdayaan keluarga; permasalahan pekerja migran; manajemen lembaga pelayanan sosial; pekerjaan sosial di dunia industri; dampak sosial komersialisasi pendidikan; konflik sosial, masyarakat multikultural, dan modal kedamaian sosial; serta globalisasi. Alih-alih menawarkan solusi inovatif, bagian ini lebih menekankan pada peran dan posisi pekerjaan sosial dalam konteks penanganan beragam permasalahan sosial. Artinya, penulis hanya menekankan pentingnya peran pekerjaan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosialnya.

Secara holistik buku ini ingin memperkenalkan apa sebenarnya pekerjaan sosial yang sering diasumsikan hanya sebagai kegiatan filantropi. Penulis ingin membuka wacana pembaca bahwa pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dapat menjadi mediator dalam masyarakat sehingga mampu memahami dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dua konsep ini perlu diadopsi, tentu dengan penyesuaian konteks lokal, untuk menyelesaikan beragam permasalahan sosial di Indonesia.

Sayangnya, buku ini tidak menyajikan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan mutakhir yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial di masyarakat. Sebagai contoh, penulis sebenarnya dapat melakukan studi kasus terhadap P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), sebuah proyek pemerintah yang diusung oleh Departemen Pekerjaan Umum. Melalui studi kasus, dapat diketahui bagaimana proyek ini direncanakan hingga dievaluasi. Selain itu, dapat diketahui pula apakah pekerja sosial yang ada di dalamnya sudah berperan secara maksimal dalam meningkatkan

keberfungsian sosial masyarakat. Dengan demikian, pembaca akan dapat memahami kerangka teoritis yang disajikan dengan lebih baik.

Buku ini tetap menarik untuk dibaca. Keberanian penulis untuk menyajikan kerangka teoritis yang rinci akan sangat membantu pembaca untuk lebih memahami hakikat pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Selain itu, dua konsep ini akan sangat membantu pembaca untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berbasis pemberdayaan. Dan bagi para pekerja sosial, buku ini akan memudahkan mereka dalam menempatkan diri dan mengambil peran dalam memelihara dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat.

Daftar Kepustakaan

Priyono, Onny S. & Pranarka, AMW (Eds). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Susanto, Hari (Ed). 2000. *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat)*. Bogor: PT Sarbi Moerhani Lestari.

Nilai dan Peringkat *HDI (Human Development Index)* Indonesia pada Tahun 2005 (http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html, diakses pada 21 Januari 2008).

Jumlah dan Peringkat Populasi Indonesia pada Tahun 2008 (<http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl>, diakses pada 9 Mei 2008).

